

Habis BBM, Terbitlah Krisis Listrik

Senin, 21 Juli 2008



Sumber : Seputar Indonesia, <http://www.seputar-indonesia.com/ediscetak/opini/habis-bbm-terbitlah-listrik-3.html>

Dalam rapat di Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia, Senin minggu lalu bersama para pengurus Kadin daerah seluruh Indonesia dan asosiasi bisnis, masalah krisis listrik menjadi topik yang hangat dibicarakan. Belum habis kekegetan pelaku bisnis dengan kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM), kini mereka “tersengat krisis listrik” dengan dikeluarkannya surat keputusan bersama (SKB) lima menteri. Ancaman deindustrialisasi yang makin parah tampaknya harus diantisipasi. Mengapa SKB ini muncul dan apa akar masalah di balik krisis listrik?

Krisis kelistrikan terjadi akibat beberapa hal. Pertama, menyangkut terbatasnya kapasitas pembangkit dan menyangkut keterbatasan kemampuan membeli energi. Pertumbuhan ekonomi Indonesia yang dalam tujuh kuartal terakhir tumbuh di atas 6% ternyata tidak dibarengi ketersediaan daya listrik sebagai infrastruktur pendukung. Studi dari LPEM Fakultas Ekonomi UI (2007) tentang iklim investasi menemukan bahwa masalah infrastruktur kelistrikan yang memburuk menjadi salah satu faktor penghambat investasi Indonesia.

Kedua, sejak terjadi kenaikan harga BBM, banyak industri yang mengalihkan konsumsi listrik ke PLN. Pengalihan itu dikarenakan biaya pengoperasian pembangkit listrik secara swadaya dengan solar menjadi mahal. Namun, *growth consumption* listrik PLN tidak diimbangi dengan peningkatan kapasitas produksi listrik PLN. Kapasitas terpasang pembangkit listrik saat ini sebesar 29.705 MW. Kapasitas tersebut berasal dari pembangkit PLN sebesar 24.925 MW atau 83,3% dari total kapasitas terpasang, pembangkit swasta (IPP) sebesar 3.984 MW atau 13,4%, dan pembangkit terintegrasi (PPU) sebesar 796 MW atau 3,3%. Hampir 67% dari total pelanggan yang menggunakan kapasitas tersebut berdomisili di Area Jawa dan Bali. Tentu ini beban yang sangat tinggi bagi PLN Pembangkit Jawa dan Bali. Dalam SKB yang ditandatangani oleh Menteri Perindustrian, Menteri ESDM, Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Menteri Dalam Negeri, dan Menteri BUMN ini disebutkan, setiap perusahaan industri diwajibkan mengalihkan satu atau dua hari kerja dalam sebulan, bukan dua hari kerja setiap pekan, ke hari Sabtu atau Minggu.

Sebelumnya untuk penghematan listrik, PLN memberlakukan kebijakan pemadaman bergilir di sejumlah wilayah di Indonesia. Padahal kita tahu bahwa kondisi kelistrikan di Indonesia sangat buruk. Indonesia berada pada urutan ke-11 dari 12 negara sekawasan. Rasio elektrifikasi saat ini sekitar 64,3% dan rasio desa berlistrik sebesar 91,9%. Adapun sasaran kelistrikan adalah tercapainya rasio elektrifikasi sebesar 65,3% pada 2009, 67,2% pada 2010, dan 93% pada 2025. Sementara rasio desa berlistrik diharapkan tercapai 100% pada 2010. Masalahnya kini, kemampuan PLN dalam mengimbangi konsumsi listrik yang ada masih minim. Di Padang, gara-gara listrik mati 2–4 kali sehari, para pengusaha kecil dan menengah menanggung rugi

sampai jutaan rupiah per hari. Di Sumatera Utara, listrik yang hidup-mati 4 kali sehari mengakibatkan kapasitas terpasang industri hanya sekitar 60%.

Pemadaman listrik ini adalah sebuah bukti betapa kebijakan pemerintah hanya berdimensi jangka pendek dan tidak komprehensif. Ide pergeseran hari operasional industri dilakukan karena *idle capacity* listrik selama Sabtu-Minggu cukup besar. Setiap Sabtu dalam sistem kelistrikan Jawa-Bali terdapat daya listrik *idle* sebesar 1.000 MW, sedangkan untuk hari Minggu sebesar 2.000 MW. Dengan kata lain, total setiap Sabtu- Minggu daya listrik “nganggur” sebesar 3.000 MW.

Dengan adanya kondisi tersebut, diharapkan kalangan industri bisa melakukan libur secara bergiliran, tidak semuanya pada Sabtu-Minggu. SKB lima menteri yang akan berlaku efektif mulai hari ini dapat dipastikan makin merepotkan pelaku industri. Berdasarkan survei, karena listrik yang *byar-pet*, sektor industri di Indonesia rata-rata baru menggunakan sekitar 53,45% hingga 77,82% dari kapasitas produksinya. Artinya, masih banyak pabrik dan mesin-mesin industri yang belum beroperasi pada kapasitas penuh. Sampai triwulan I/2008, pemanfaatan kapasitas memburuk dibandingkan pada 2007.

Sektor industri adalah sektor penopang perekonomian nasional. Hingga kuartal I/2008, peranan sektor industri manufaktur mencapai sekitar 27% dari PDB. Sejak krisis ekonomi Asia sampai 2007, pertumbuhan sektor industri manufaktur hanya meningkat dengan laju satu digit di bawah 10%, padahal sebelum krisis dapat tumbuh dengan dua digit. Sampai dengan awal 2008 industri hanya tumbuh sekitar 5,69% atau menurun hampir 2% sejak 2004. Penurunan pertumbuhan industri ini diperkirakan akan makin diperparah dengan kebijakan pengalihan jam kerja tersebut. Padahal jika kita cermati, jumlah pelanggan listrik nonsubsidi tertinggi adalah sektor bisnis yang mencapai 226,8 ribu pelanggan ditambah lagi dengan usulan untuk menaikkan tarif listrik untuk industri. Tentu hal ini akan menambah beban bagi dunia industri.

Patut dicatat, ada dua industri yang mengalami masa *bonanza* selama pemerintahan SBY-JK. Semenjak 2004 sampai triwulan I/2008, industri alat angkut-mesin-peralatan menjadi cabang industri dengan laju pertumbuhan tertinggi sebesar 12,9%. Industri pupuk-kimia-barang dari karet menjadi cabang industri dengan laju pertumbuhan tertinggi kedua sebesar 6,23%. Selama tiga tahun terakhir, kedua industri ini boleh dikata merupakan *sunrise industry*. Indikatornya sederhana, yaitu pangsaanya melebihi rata-rata per subsektor industri dan memiliki pertumbuhan di atas rata-rata industri. Sebelum pengumuman kenaikan harga BBM pada Mei 2008, hampir semua industri nonmigas yang tergolong *sunset industry* memburuk dibandingkan akhir 2007. *Sunset industry* ditandai dengan pangsa subsektor industri yang lebih kecil daripada rata-rata seluruh industri dan memiliki pertumbuhan di bawah rata-rata industri. Pertumbuhan industri terendah tahun ini terjadi pada industri tekstil, barang kulit, dan alas kaki yang pertumbuhannya minus 7,10% lebih buruk dari tahun 2007, yaitu minus 3,68%, industri barang lainnya dari minus 2,82% menjadi minus 6,88%, industri barang kayu dan hasil hutan minus 0,06%, lebih baik daripada tahun lalu yang minus 1,74%.

Belum selesai industri yang tergolong *sunset industry* ini menderita akibat dampak kenaikan harga BBM bulan Mei, mereka juga masih harus merasakan kondisi ekonomi makro yang tidak pasti. Belum lagi *byar-pet* listrik di Indonesia tentu akan semakin membuat industri terseok-seok. Gejala deindustrialisasi mulai terlihat dengan makin banyaknya perusahaan dalam industri tersebut yang menutup usaha atau setidaknya mengurangi jumlah karyawan.

Hal lain yang harus menjadi perhatian adalah potensi meningkatnya pemutusan hubungan kerja (PHK) karyawan pasca pemberlakuan SKB ini. Menurut data dari Depnakertrans, selama Januari–April 2008 sebanyak 47 perusahaan telah mem-PHK 1.417 pekerja. Dengan SKB lima menteri ini, industri akan berusaha menekan biaya produksinya yang salah satu komponennya dengan mengurangi jumlah karyawan. Tentu kita tidak ingin melihat indikator angka pengangguran memburuk di tengah perekonomian yang membaik ini.

Selain sektor industri, berbagai kegiatan dalam kehidupan kita pun tidak lepas dari perlunya ketersediaan tenaga listrik. Kegiatan rumah tangga, pendidikan, ekonomi, serta kegiatan yang lain yang menunjang kehidupan kita sehari-hari sangat tergantung pada listrik. Jika ketersediaan tenaga listrik berkurang, berbagai kegiatan sehari-hari tidak akan berjalan optimal. Konsekuensinya, target pertumbuhan ekonomi 6% dan pertumbuhan industri di atas 5% tampaknya sulit tercapai. Bila RA Kartini menulis buku berjudul *Habis Gelap Terbitlah Terang*, barangkali sudah saatnya kita menulis drama ekonomi Indonesia dengan judul “*Habis BBM Terbitlah Krisis Listrik*”. Tanpa upaya serius menyelesaikan krisis listrik dengan cerdas dan tidak kontra-pertumbuhan, drama deindustrialisasi babak berikutnya akan berlanjut. (*)

Prof Mudrajad Kuncoro, PhD

Guru Besar dan Ketua Jurusan Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomika & Bisnis UGM